



LAPORAN PELAKSANAAN

FIRST MEETING OF THE PREPARATORY COMMITTEE FOR
THE IN-PERSON SEGMENT OF THE FIFTH WORLD
CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENT (5WCSP)

(Virtual Meeting, 22 Februari 2021)



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

*”First meeting of the Preparatory Committee for the in-person segment of the
Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)”*
(VIRTUAL)

JENEWA, SWISS

22 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

World Conference of Speaker Parliament (WCSP) merupakan pertemuan penting yang dihadiri para Ketua Parlemen yang tergabung di dalam Inter-Parliamentary Union (IPU). Pertemuan ini menunjukkan bahwa parlemen bersungguh-sungguh dalam upayanya melakukan diplomasi parlemen sebagai penyeimbang diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertemuan ini sedianya dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan Vienna, Austria sebagai lokasi penyelenggaraan pada tahun 2020. Pertemuan yang seharusnya berjalan secara fisik tersebut terpaksa dialihkan menjadi pertemuan virtual dan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan langkah para Ketua Parlemen untuk mendorong diplomasi global menjadi lebih inklusif dan melibatkan parlemen sebagai perwakilan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan secara fisik yang seharusnya diselenggarakan tahun lalu ditunda pelaksanaannya menjadi akhir tahun 2021. Salah

satu persiapan yang dilakukan dalam rangka WCSP adalah membentuk *Preparatory Committee* yang beranggotakan para Ketua Parlemen dan bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan (ToR), Agenda, maupun tema yang dipilih. Dr. (H.C.) Puan Maharani terpilih sebagai salah satu anggota *Preparatory Committee* sebagai perwakilan Grup Asia-Pasifik di IPU pada Sidang *Governing Council* pada bulan November 2020. Pada pertemuan perdana, Ketua DPR RI sebagai anggota *Preparatory Committee*, didampingi oleh Sihar Sitorus, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, dengan Sekretariat IPU, Jenewa sebagai penyelenggara.

B. SUSUNAN DELEGASI

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. (H.C.) Puan Maharani	F. PDIP/ A-188	Ketua DPR RI
2.	Dr, Sihar Sitorus	F. PDIP/ A-139	Wakil Ketua BKSAP

C. VISI DAN MISI DELEGASI

- Mendapatkan gambaran besar terkait pelaksanaan the Fifth World Conference of Speakers of Parliament yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2021.
- Memberikan pandangan/ide Indonesia terkait pelaksanaan acara tersebut.
- Bertukar pengalaman dengan Ketua Parlemen yang tergabung di dalam *Preparatory Committee*, dimana hal ini penting dilakukan karena pertama kalinya Indonesia tergabung di dalam komite tersebut.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Pidato dan Saran Butir Wicara.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

1. Adopsi agenda

2. Tinjauan mengenai segmen virtual 5th WCSP pada 2020 (CONF-2021/PrepCom1/2-R.1)

Komite Pertemuan (PrepCom) telah menerima salinan laporan pertemuan yang lalu pada tanggal 14 Oktober 2020, yang meliputi penilaian mengenai *outcome* dan hasil pertemuan virtual tahun lalu.

- Presiden IPU menyampaikan pidato pembukaan dan refleksinya mengenai arah ke depan;
- Sekretaris Jenderal IPU memberikan tinjauan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dalam konteks segmen virtual 5WCSP;
- Ketua Parlemen Austria sebagai tuan rumah akan memaparkan status persiapan Konferensi Tatap Muka di Vienna
- Direktur Jenderal Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, yang mewakili Sekretaris Jenderal PBB dalam Preparatory Committee, memberikan tinjauan mengenai Konsultasi UN7-5 dan hasil-hasilnya, serta juga proses ke depan untuk menguatkan multilateralisme.

3. Persiapan untuk Konferensi Tatap Muka di Vienna pada 2021 (CONF-2021/PrepCom1/3-R.1)

Komite Persiapan mempelajari berbagai opsi untuk Konferensi Tatap Muka di Vienna pada 2021, termasuk kemungkinan tanggal, lokasi, pengaturan praktis dan program secara keseluruhan untuk Konferensi Ketua-Ketua Parlemen dan Pertemuan Tingkat Tinggi Ketua-Ketua Parlemen Perempuan

4. Agenda Lain-Lain

B. SITUASI UMUM

AGENDA 1

Agenda diterima secara bulat dan tidak ada intervensi.



Para Ketua Parlemen yang hadir secara virtual pada rapat Preparatory Committee

AGENDA 2

1. Sambutan oleh Mr. Duarte Pacheco, President of the IPU

- a. World Conference of Speakers of Parliament merupakan salah satu agenda terbesar IPU, yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- b. Pertemuan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka pada tahun 2020, terpaksa dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19. Rencananya pertemuan pada tahun 2021 akan dilakukan secara *hybrid*.

- c. Parlemen Austria menyatakan harapannya untuk melakukan pertemuan secara tatap muka/luring di bulan September 2021, jika tidak dilakukan di bulan itu, maka akan sulit untuk menyesuaikan dengan berbagai agenda yang telah direncanakan oleh IPU di masa mendatang.
- d. Melalui peran parlemen dan diplomasi parlemen yang menekankan pada multilateralisme, maka agenda ini selayaknya menjadi prioritas bersama.

2. Sambutan oleh President of Nationalrat/Ketua Parlemen Austria, Mr. Wolfgang Sobotka

- a. Situasi ekonomi dan sosial secara umum sangat sulit bagi banyak negara di seluruh dunia dikarenakan pandemi COVID-19.
- b. Kita harus juga memprioritaskan solusi ekonomi dan sosial di samping menanggulangi permasalahan kesehatan.
- c. Di tengah situasi darurat ini, parlemen harus memperkuat prinsip multilateralisme dan solidaritas internasional di tengah kondisi ini. Tidak hanya solidaritas, tapi juga bertemu secara langsung
- d. Kita perlu berfikir mengenai bagaimana *“live with COVID-19”*, maka saat ini prioritas utama adalah untuk memastikan segala situasi kembali normal
- e. Rencana pertemuan September 2021 adalah saat yang tepat. Austria menyatakan sedang mempersiapkan kegiatan tersebut dan telah mempersiapkan juga lokasi yang tepat.
- f. Pilihan hybrid bisa digunakan jika ada parlemen yang tidak bisa hadir dalam pertemuan di awal September 2021. Perlu menjadi catatan: jumlah delegasi dan durasi pertemuan berapa hari, topik yang diangkat (bukan hanya pandemi tapi juga keamanan, peran parlemen, demokrasi, perlindungan bagi anggota parlemen □ berkaca pada apa yang terjadi di US Capitol, radikalisme, kebebasan sipil, ekstrimisme).
- g. Persiapan konferensi ini merupakan prioritas bagi Parlemen Austria.

3. Sambutan dari Ms. Tatiana Valovaya, Director-General, United Nations Office at Geneva

- a. Perlu dilakukan kolaborasi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Inter-Parliamentary Union (IPU), karena dengan kegiatan ini, PBB bisa mendapatkan masukan dari parlemen mengenai berbagai isu, terutama dari sudut pandang parlemen.
- b. IPU adalah pilar penting multilateralisme yang mendukung semua agenda PBB, terutama tentang berbagai isu yang menjadi perhatian Bersama.
- c. IPU adalah jembatan bagi perwakilan national dan international, peran IPU sangat penting dalam memberikan masukan bagi PBB.
- d. Beberapa fokus bersama: memastikan akses vaksin yang merata, memastikan penegakan HAM, memastikan tidak ada jarak dalam akses teknologi digital.
- e. COVID-19 telah menyebabkan banyak orang jatuh dalam jurang kemiskinan ekstrim. Maka, *redoubling effort* dalam mencapai SDGs harus menjadi prioritas seluruh negara, dalam hal ini parlemen memegang peran penting melalui *translating SDGs into laws and monitoring the achievement of SDGs*.
- f. *Self-assessment toolkit* merupakan langkah yang baik untuk memastikan pencapaian SDGs, utamanya di tengah pandemi.
- g. Isu perubahan iklim, pendidikan, sanitasi, lingkungan, merupakan isu penting yang membutuhkan peran parlemen di dalamnya.
- h. 5th WCSP yang akan dilakukan secara tatap muka/luring, akan menjadi peluang dalam meneguhkan komitmen parlemen dalam memperkuat multilateralisme di tengah pandemi.

4. Sambutan dari Martin Chungong, Secretary-General of the IPU

- a. Menyambut seluruh peserta pertemuan, utamanya para Ketua Parlemen yang baru saja bergabung.
- b. Di tengah pandemi, kolaborasi sangat diperlukan. Sekretaris-Jenderal IPU berharap bahwa agenda pada September 2021 dapat dilaksanakan agar memperkaya strategi baru IPU yang mencerminkan isu-isu penting yang dihadapi dunia saat ini.
- c. Sekretaris-Jenderal IPU sudah mendistribusikan dokumen latar belakang terkait persiapan pertemuan tatap muka dan virtual tahun lalu.

- d. IPU mengupayakan agar pertemuan dapat dilakukan karena ini adalah saat yang penting dalam memperkuat kolaborasi antar Ketua Parlemen.
- e. Pertemuan the 13th Women Speakers Conference juga diharapkan dapat dilakukan pada September 2021.

AGENDA 3

1. Sambutan dari Mr. Duerte Pacheco, President of the IPU

- a. Mengundang komentar, masukan, dan saran dari seluruh delegasi yang hadir terkait persiapan pertemuan September 2021 mendatang. Pilihannya adalah 6-9 September 2021, hari pertama menyelenggarakan the 13th Summit of Women Speakers, hari kedua dan ketiga menyelenggarakan the 5th WCSP.
- b. Perlu diputuskan tema dan point-point pembahasan apa saja yang akan dibicarakan pada konperensi tersebut.
- c. Diharapkan sekretariat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan agar dapat segera disirkulasikan ke seluruh Ketua Parlemen dan perlunya dibentuk panitia untuk persiapan the 5th WCSP.
- d. Selama ini, para Ketua Parlemen hanya membaca pernyataan/*statement*, maka akan dicari formula baru agar seluruh Ketua Parlemen dalam melakukan interaksi secara lebih dinamis.
- e. Isu yang perlu dibahas dan diputuskan:
 - Konferensi akan diselenggarakan dan perlu diputuskan tanggal penyelenggaraan. Tanggal yang diusulkan adalah 6-8 September 2021.
 - Hari pertama pertemuan diperuntukkan bagi Ketua Parlemen wanita, 2 hari selanjutnya pertemuan seluruh Ketua Parlemen. Pertemuan Ketua Parlemen wanita merupakan agenda penting untuk diselenggarakan.
 - Akan diselenggarakan pertemuan penanggulangan terorisme antara United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) dan IPU setelah konferensi selesai bagi para Ketua Parlemen yang tertarik.
 - Agenda pembahasan apa saja yang sudah dibicarakan dalam pertemuan tahun lalu termasuk *Outcome* yang sudah dihasilkan agar bisa menjadi *road map* untuk deklarasi final. Perlu diperkuat komitmen agar sejalan dengan kepentingan masyarakat yang diwakili.

- Sekretariat IPU bertugas untuk mempersiapkan dokumen yang akan didistribusikan sebelum pertemuan agar bisa segera mendapatkan tanggapan dari parlemen.

2. Tanggapan dari Ms. Claudia Roth, Deputy Speaker of Germany

- Mendukung penuh diadakannya 5th WCSP untuk dilakukan secara fisik Jerman menyatakan siap berpartisipasi dan mempersiapkan pertemuan tersebut untuk dilakukan pada September 2021 (waktu yang tepat karena ke depan masih banyak pertemuan penting).
- Perempuan menghadapi banyak tantangan di tengah pandemi.
- Krisis dan perubahan iklim merupakan salah satu yang menjadi perhatian.
- Kita membutuhkan deklarasi baru terkait bagaimana merespon situasi pandemi, karena deklarasi tahun lalu tidak diterima oleh seluruh anggota IPU, disebabkan keberatan dari beberapa negara.

3. Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- Ketua DPR RI merupakan anggota baru dari Preparatory Committee.
- Pandemi menunjukkan pentingnya kerja sama internasional yang sudah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara.
- Vaksin sudah tersedia, tapi distribusinya perlu dipastikan agar lebih inklusif dan merata.
- WCSP penting dalam memastikan kerja sama global, terutama penguatan peran diplomasi parlemen.
- Mengusulkan tema agar menekankan pada peran parlemen ke depan, apalagi di tengah pandemi.
- Ketua DPR mendukung pertemuan Women Speaker Summit dan berharap agar pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar ketua parlemen perempuan dalam merespon berbagai isu terkait pandemi, terutama tantangan yang dihadapi perempuan.
- Opsi *hybrid meeting* juga tetap dipersiapkan jika pertemuan fisik/luring tidak dapat dilaksanakan

- h. Ketua DPR RI menyetujui masukan dari rekan Jerman bahwa deklarasi harus merefleksikan apa yang terjadi saat ini, utamanya di tengah pandemi COVID-19.



Ketua DPR RI memberikan pandangannya terkait pelaksanaan Sidang 5WCSP pada September 2021

4. Tanggapan dari Ms. Fawzia Zainal, Speaker of Bahrain

- a. Terkait Preparatory Committee untuk Women Speakers Summit dan 5th WCSP, Bahrain menyatakan siap untuk berpartisipasi.
- b. Bagaimana merespon isu terorisme dan ekstrimisme merupakan topik yang perlu dibahas, di samping pembahasan terkait pandemi COVID-19.
- c. Mendukung apa yang disampaikan ketua DPR RI bahwa deklarasi ke depan harus dapat merespon situasi terkini akibat pandemi COVID-19.

5. Tanggapan dari Ms. Beatriz Argimon, President of Senate of Uruguay

- a. Menyatakan dukungan atas semua agenda yang telah disampaikan dan mengapresiasi seluruh Ketua Parlemen yang berpartisipasi dalam pertemuan virtual ini.

- b. Uruguay siap untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam menyukseskan agenda 5th WCSP dan Women Speakers Summit.
- c. Pertemuan ini sangat penting karena parlemen adalah perwakilan rakyat yang harus merefleksikan situasi yang dialami masyarakat. Maka, Uruguay berharap agar topik terkait *post-pandemic scenario, labor, climate change, peace* dapat dibahas dalam pertemuan WCSP di Austria nanti.
- d. Topik mengenai kemiskinan juga perlu untuk di-*highlight* karena ini apa yang terjadi saat ini.
- e. Wanita mengalami tantangan yang besar di tengah pandemi saat ini, maka perlu dipastikan seluruh perempuan dapat mandiri secara finansial.

6. Tanggapan Ms. Tone Wilhelmsen Troen, President of Storting, Norway

- a. Setuju dengan semua pembahasan yang disampaikan sebelumnya dan setuju untuk melakukan secara *hybrid* di bulan September 2021.
- b. Usulan topik: ekstrimisme dan terorisme, *highlight* mengenai tantangan yang dihadapi wanita selama pandemi, *security of parliaments*, dan peran parlemen di tengah pandemic.
- c. Berharap agar konferensi ini agar lebih interaktif dan fokus hanya ke beberapa topik.
- d. Usulan format: lebih dinamis / *panel discussion in small groups* agar lebih interaktif antar Ketua Parlemen yang hadir.
- e. Saran untuk sekretariat: melakukan reformulasi terkait draft deklarasi agar didistribusikan kepada seluruh delegasi sebelum disahkan (perlunya transparansi).

7. Tanggapan dari Mr. Steingrimur J. Sigfusson, Speaker of Althingi, Iceland

- a. Mendukung diadakannya pertemuan di bulan September 2021.
- b. Usulan tema: bagaimana respon parlemen dalam mengatasi situasi pandemi saat ini. Di tengah pandemi, banyak parlemen yang mengadopsi aturan / UU terkait penanganan pandemi, maka akan sangat menarik untuk melihat bagaimana pencapaian ini sudah terwujud dan apa saja tantangannya. Maka pertemuan 5th WCSP dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman terbaik.
- c. Isu lain yang perlu dibahas adalah terkait keamanan.

8. Tanggapan dari Mr. Jacob Mudenda Speaker of National Assembly of Zimbabwe

- a. Perlu untuk mengadopsi *rule of procedure* yang baru agar selaras dengan perubahan akibat pandemi.
- b. Terkait *Meeting of Women Speakers*, perlu diperjelas karena pada pertemuan sebelumnya terdapat beberapa masalah terkait keikutsertaan pada 5th WCSP.
- c. Mendukung jika diadakan dengan model skema *panel discussion* agar lebih interaktif.

9. Tanggapan dari Ms. Susan Kihika, President of the Bureau of Women Parliamentarians

- a. Mendukung dibentuknya panitia persiapan khusus mengenai pertemuan Women Speakers, agar tidak bergantung pada Preparatory Committee.
- b. Pandemi ini memberikan banyak dampak buruk bagi wanita dan anak perempuan, topik ini seharusnya dibahas tidak hanya pada pertemuan parlemen perempuan, tapi pada pertemuan utama.

10. Tanggapan dari Ms. Zinaida Greceanii, Preciden of the Parliament of Moldova

- a. Mengusulkan topik keamanan parlemen (topik yang penting saat ini) dan juga dukungan kepada keluarga-keluarga selama pandemi (subsidi dan bantuan).
- b. Agar lebih banyak interaksi dan diskusi panel yang dinamis.
- c. Berharap ada beberapa versi deklarasi, agar peserta bisa memberikan masukan dan tanggapan.

11. Tanggapan dari Ms. Stephanie D'Hose, President of Senate of Belgium

- a. Presiden Senat Belgia merupakan perwakilan parlemen muda dan perempuan.
- b. Mendukung diadakannya pertemuan secara dinamis dengan menyeimbangkan waktu bicara para pakar dan waktu bicara para Ketua Parlemen.
- c. Mengusulkan topik terkait kerugian yang terjadi di tengah pandemi perlu untuk dibahas.

- d. Belgia siap untuk berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Women Speakers Conference.

12. Tanggapan dari Mr. Wolfgang Sobotka, President of Nationalrat, Austria

- a. Siap untuk menanggung sebagai besar biaya tambahan yang timbul akibat diadakannya konferensi.
- b. Optimis untuk dilakukan secara tatap muka, karena suasana tatap muka sangat berbeda dengan virtual.

13. Tanggapan dari Mr. Li Zhanshu, Chairman of the Standing Committee of NPC, China

- a. Akan mendonasikan 250,000 Swiss Franc untuk pelaksanaan konferensi ini (menurut Governing Council).
- b. Mendorong untuk melakukan penghematan pada area-area yang penting.
- c. Mendorong pengarusutamaan multilateralisme di tengah kondisi pandemi saat ini, memastikan perdamaian dan keamanan seluruh individu melalui kolaborasi antar-parlemen di seluruh dunia
- d. Menekankan pada poin-poin:
 - Mendorong koordinasi kebijakan makroekonomi.
 - Menghilangkan kecurigaan ideologis dan hidup berdampingan secara damai.
 - Mendorong kerja sama yang erat di antara negara berkembang dan maju untuk mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua orang.
 - Bekerja sama mengatasi tantangan global.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyelenggaraan 5th WCSP akan dilakukan pada tanggal 6-8 September 2021.
2. Menyetujui agar sebelum 5th WCSP diselenggarakan, didahului dengan penyelenggaraan Women Speaker Summit (pada hari pertama), dan pilihan untuk menghadiri konperensi terkait isu terorisme pada hari terakhir.
3. Dalam 2 (dua) hari konperensi, diharapkan dalam satu hari bisa diadakan 2 (dua) sesi, sehingga lebih optimal.

4. Austria sebagai tuan rumah (*host* sidang) akan menanggung biaya tambahan yang dibutuhkan.
5. Mengharapkan agar sebagian besar Ketua Parlemen dapat menghadiri pertemuan fisik/tatap muka (sebagai rencana A), tetapi tetap mempersiapkan rencana B, yaitu pertemuan yang dilaksanakan secara *hybrid* bagi yang tidak bisa hadir karena kondisi pandemi.
6. Rancangan agenda dan resolusi agar menampung berbagai usulan dari seluruh Ketua Parlemen hari ini, utamanya menekankan pada tantangan terhadap pandemi COVID-19 (*post-pandemic reality*), tapi kita juga dapat mendiskusikan berbagai isu lainnya yang menjadi perhatian bersama (*attack to parliament, security, climate change*, dan lain sebagainya).
7. Merencanakan pertemuan lanjutan bulan depan untuk membahas isu-isu yang lebih spesifik.
8. Executive Committee IPU memutuskan bahwa peran parlemen dalam pandemi akan menjadi isu utama dalam pertemuan pada bulan Mei (IPU General Assembly). Apakah tema tersebut akan dipakai lagi pada 5th WCSP atau mengangkat isu kepemimpinan dalam masa pandemi.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti acara ini adalah sejumlah Rp. 5.990.000 (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti sidang virtual “*First meeting of the Preparatory Committee for the in-person segment of the Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5th WCSP)*” pada tanggal 22 Februari 2021 di Jenewa, Swiss. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Februari 2021

a.n Ketua Delegasi,

T.T.D.

Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA
A-139

LAMPIRAN



SARAN BUTIR WICARA

**AGENDA 3
PREPARATIONS FOR THE IN-PERSON
CONFERENCE IN VIENNA IN 2021**

**DR (H.C.) PUAN MAHARANI
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PADA PERTEMUAN *VIRTUAL*

**THE PREPARATORY COMMITTEE
OF THE FIFTH WORLD CONFERENCE
OF SPEAKERS OF PARLIAMENT**

JAKARTA, 22 FEBRUARI 2021

**Yang Mulia Bapak Duarte Pacheco, President IPU,
Yang Mulia para Speakers dan Presiden Parlemen,
Yang Terhormat Sekretaris Jenderal IPU
Bapak Martin Chungong,
Yang Terhormat seluruh hadirin,**

- Selamat malam dari Jakarta. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pandangan saya pada pertemuan *Preparatory Committee* hari ini.
- Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Bapak Sihar Sitorus.

(Catatan: salam pembuka dapat disampaikan, jika tidak memberi intervensi pada agenda 2 sebelumnya.)

Pandangan umum terkait Speakers Conference

- The Fifth Speakers Conference ini diadakan pada saat yang tepat yaitu disaat dunia menghadapi tantangan besar untuk mengatasi pandemi COVID-19.
- Pandemi global ini menyadarkan akan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani masalah bersama ini. Saat ini kerjasama internasional telah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara.
- Vaksin sudah mulai tersedia sejak awal tahun 2021, namun distribusinya masih belum merata. Dalam hal ini, Speakers Conference perlu terus mendorong terjaminnya akses adil

bagi vaksin yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang.

- Speakers Conference kali ini akan menjadi forum yang tepat untuk memperat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama.
 - Kita dapat berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan kepemimpinan Parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan paska pandemi.
- Speakers Conference perlu ikut memastikan agar pemulihan paska pandemi dapat dilakukan sejalan dengan pencapaian SDGs dan Paris Climate Agreement.

Thema dan hasil Konperensi

- Thema konpererensi sangat penting dan menjadi kunci sukses Speakers Conference. Untuk menentukan thema, maka perlu ditentukan kriteria yaitu:
 - isu yang relevan dan menjadi kepentingan bersama negara-negara anggota IPU;
 - isu yang relevan dari tahun 2021 ini hingga penyelenggaraan the 6th Speakers Conference tahun 2025.
- Melihat kriteria ini ini maka tema yang tepat adalah terkait “Kepemimpinan Parlemen dalam masa pemulihan paska pandemi COVID-19.”

- Jika tetap dipilih tema umum terkait “*Parliamentary Leadership for more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet,*”
 - maka pembahasan perlu difokuskan pada isu pemulihan paska pandemi yaitu *Sustainable Recovery in the Post COVID-19 Era.*
- Terkait hasil Konperensi, hal ini perlu dibahas sejak awal. Saya usulkan mekanisme perlu disetujui bersama antara Presiden IPU, Speaker Parlemen *host country*, dan para anggota *Preparatory Committee.*
 - Hasil Konperensi perlu merujuk kepada tema, perkembangan terakhir dunia saat ini, dan peran Parlemen kedepan yang diharapkan.

13th Summit of Women Speakers

- Mengenai Summit of Women Speakers, sebagai pemimpin Parlemen perempuan, tentu saya mendukung pelaksanaan acara ini. Summit ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi, dan sinergi antarpimpinan parlemen perempuan seluruh dunia.
 - Summit ini akan menjadi forum yang tepat untuk berbagi pengalaman bagaimana Parlemen perempuan dapat berperan besar dalam penanganan pandemi.
- Tema yang diusulkan terkait “*Women’s Parliamentary Leadership in a Time of COVID-19 and Recovery*” sangat relevan untuk dibahas saat ini.

- Dalam kaitan ini, isu terkait *gender-responsive recovery* dan *women economic empowerment* merupakan isu utama yang perlu mewarnai pembahasan pada Summit tersebut.

Waktu dan tempat Konperensi dan Summit

- Situasi pandemi yang berkepanjangan menyebabkan ketidakpastian meskipun Konperensi diadakan pada bulan September 2021.
- Karenanya perlu dipilih opsi *hybrid meeting*, dengan tidak menutup kemungkinan menjadi *virtual meeting*, jika situasi tidak memungkinkan datang langsung ke Wina.

Struktur Speakers Conference dan Panel Discussion

- Saya mendukung usulan struktur Konperensi ini, dimana terdapat Summit of Women Speakers pada hari pertama dan dilanjutkan Speakers Conference selama dua hari.
- Saya usulkan agar dapat dilakukan tiga kali *panel discussion* setiap harinya, yang membahas topik spesifik yang menjadi kepentingan bersama.
- Pembahasan pada *panel discussion* perlu ditujukan
 - untuk memberi masukan dan menghasilkan ide-ide baru bagi para pimpinan Parlemen tentang topik-topik yang dibahas.

- Selain topik yang diusulkan pada paper Sekretariat IPU, maka dapat dipertimbangkan pula topik *panel discussion* terkait:
 - akses terhadap vaksin, serta akses dan dampak teknologi digital dalam masa pandemi.

Demikian masukan saya pada pertemuan ini, yang saya harapkan dapat melengkapi pembahasan *Preparatory Committee* hari ini. Terima kasih.

---o0o---



SARAN BUTIR WICARA

AGENDA 2 OVERVIEW OF THE VIRTUAL SEGMENT OF THE 5th WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENT IN 2020

**DR (H.C.) PUAN MAHARANI
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PADA PERTEMUAN *VIRTUAL*

**THE PREPARATORY COMMITTEE
OF THE FIFTH WORLD CONFERENCE
OF SPEAKERS OF PARLIAMENT**

JAKARTA, 22 FEBRUARI 2021

**Yang Mulia Presiden IPU Bapak Duarte Pacheco,
Yang Mulia para Speakers dan Presiden Parlemen,
Yang Terhormat Sekretaris Jenderal IPU Bapak Martin
Chungong,
Yang Terhormat seluruh hadirin,**

- Selamat malam dari Jakarta. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pandangan saya pada *Preparatory Committee for the in-person segment of the Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)*.
- Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Bapak Sihar Sitorus.
- Di tengah berbagai tantangan global yang kita hadapi saat ini, baik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kemiskinan dan kesenjangan sosial, ketimpangan gender, konflik dan perang, serta perkembangan teknologi informasi,
 - kerjasama internasional merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya meneguhkan kembali komitmen kita akan prinsip multilateralisme yang menjunjung tinggi solidaritas, dan kolaborasi.
- Untuk itu, DPR RI memandang bahwa *the Fifth World Conference of Speakers of Parliament* sangatlah penting untuk diadakan
 - guna memperkuat komitmen Parlemen dalam memperkuat kerjasama antar Parlemen di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

- Pada pertemuan daring Agustus 2020 lalu, telah dibahas telah disepakati berbagai topik penting yang menjadi perhatian bersama antara lain: pentingnya Parlemen dalam merespon perubahan iklim, upaya *bridging the gap* antara anggota parlemen dan konstituen, pencapaian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan upaya pemberantasan terorisme dan ekstrimisme.
- Selanjutnya, saya berharap agar pada pertemuan luring tahun 2021, kita dapat menghasilkan serangkaian rekomendasi sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya pada Deklarasi mengenai *parliamentary leadership for more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development*.
- Pada kesempatan ini, dapat saya sampaikan bahwa DPR RI mendukung Deklarasi yang disepakati pada *the Fifth World Conference of Speakers of Parliament* Agustus 2020 lalu.
 - Dokumen ini selanjutnya dapat menjadi landasan bagi Parlemen seluruh dunia dalam merespon berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- Kami mengapresiasi Deklarasi yang menekankan pada pentingnya aksi kolektif secara global melalui pendekatan multilateralisme untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah pandemi.

- Dalam pencapaian SDGs ini, Parlemen menjadi kunci utama melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, serta pengawasan yang dimilikinya. Terima kasih.

---o0o---



PrepCom 1

CONF-2021/PrepCom1/3-R.1

Item 3

15 Februari 2021

**Persiapan untuk segmen tatap muka
Konferensi Ketua Parlemen Sedunia ke-5 dan KTT Ketua
Parlemen Perempuan yang ke-13**

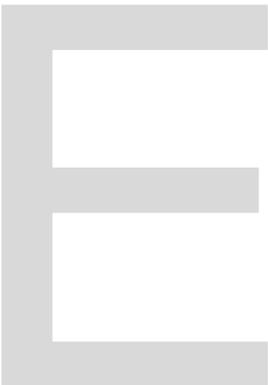
Pendahuluan

Setiap lima tahun, IPU, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyelenggarakan Konferensi Ketua Parlemen Dunia (World Conference of Speakers of Parliament, WCSP). Konferensi ini merupakan kesempatan unik untuk mempertemukan para pemimpin parlemen dari seluruh dunia, membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian utama, dan mengartikulasikan kontribusi parlemen terhadap tata kelola dunia. Informasi lebih lanjut tentang latar belakang Konferensi Ketua Parlemen ini tersedia di <https://www.ipu.org/event/fifth-world-conference-speakers-parliament> .

Dalam konteks pandemi COVID-19, telah diputuskan bahwa Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-5 akan diadakan dalam dua tahap: segmen virtual pada bulan Agustus 2020 dan segmen tatap muka di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina pada bulan Juli 2021.

Panitia Persiapan juga memutuskan bahwa Konferensi Ketua Parlemen ini akan berfokus pada tema payung “*Kepemimpinan Parlemen untuk multilateralisme yang lebih efektif untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan bagi manusia dan planet*”. Selama segmen virtual pada tahun 2020, lebih dari 115 legislator papan atas dunia membahas masalah paling mendesak bagi dunia terkait kesehatan, iklim, mobilitas manusia, pemerintahan, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan keamanan melalui debat interaktif dan diskusi panel, Puncak dari 5WCSP virtual adalah diadopsinya Deklarasi formal, yang disampaikan kepada Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Segmen tatap muka di Wina pada tahun 2021 dapat mempertahankan tema payung yang sama, yang masih sama relevannya hingga saat ini.

Selain itu, pada malam segmen virtual Konferensi Ketua Parlemen, para legislator perempuan papan atas dunia berkumpul untuk melaksanakan KTT ke-13 mereka, dengan tujuan memberikan dimensi gender pada pertimbangan dan hasil Konferensi serta membawa kesetaraan gender dan hak-hak dan pemberdayaan perempuan ke garis depan dalam upaya menghadapi COVID-19 dan pembangunan kembali yang lebih baik setelah pandemi berakhir. Segmen virtual dari KTT Ketua Parlemen Perempuan ke-13 berfokus pada "*Kepemimpinan Perempuan Parlemen di Masa COVID-19 dan Pemulihan*" dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen krisis yang responsif gender, pemberdayaan ekonomi dan inklusi keuangan perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan selama pandemi.



Konferensi Ketua Parlemen di Wina akan memberikan kesempatan untuk mempelajari perkembangan yang terjadi sejak Konferensi 2020 dan selanjutnya membangun dengan berdasarkan pengalaman tersebut. Para Ketua Parlemen mungkin ingin memusatkan pikiran pada tantangan dan kemajuan dalam melaksanakan Deklarasi 2020 tentang Kepemimpinan Parlemen, dan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana rekomendasi yang disepakati dapat diwujudkan melalui kerjasama dan solidaritas antar parlemen.

Dokumen latar belakang yang disiapkan pada tahun 2020 masih sangat relevan dan selanjutnya dapat membantu dalam menyediakan informasi untuk musyawarah di Wina.

Dokumen tersebut termasuk laporan Konferensi tentang:

- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam politik dan parlemen;
- Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;
- Demokrasi dan perubahan peran parlemen di abad kedua puluh satu;
- Sains, teknologi, dan etika: Tantangan yang muncul dan solusi mendesak;
- Dekade aksi guna mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu, Panitia Persiapan mungkin ingin mengundang Sekretariat untuk menyiapkan laporan Konferensi tentang Parlemen selama pandemi, menyoroti tantangan (seperti akses yang adil ke perangkat TIK), praktik yang baik, dan pelajaran yang diperoleh selama tahun yang sangat menantang ini.

Demikian pula, segmen tatap muka dari KTT Ketua Parlemen Perempuan (13SWSP) ke-13 di Wina akan memberikan kesempatan untuk melihat perkembangan yang terjadi tahun ini bagi perempuan dan anak perempuan serta memusatkan perhatian pada tindakan parlemen yang berorientasi pada solusi untuk pemulihan yang responsif gender. Dampak COVID-19 tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan, dan pemulihan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kelompok perempuan dan anak perempuan tertentu terkena dampak yang sangat keras, dan situasi khusus mereka membutuhkan perhatian dan fokus dari para pemimpin parlemen dan pembuat kebijakan.

Segmen tatap muka KTT Perempuan Ketua Parlemen dapat berfokus pada memerangi kerentanan dan memberikan perhatian pada anak perempuan dan perempuan muda serta pada kelompok perempuan rentan yang menderita akibat dampak interseksional pandemi.

Waktu dan tempat Konferensi dan KTT

Panitia Persiapan diundang untuk membahas berbagai pilihan dan membuat rekomendasi kepada Komite Eksekutif IPU mengenai tanggal dan tempat 5WCSP dan 13SWSP tatap muka di Wina. Ketua Parlemen tuan rumah telah bertemu dengan Dirjen UNOV, yang telah mengkonfirmasi dukungannya yang kuat untuk acara ini, dan Sekretariat IPU telah berkontak dengan tim UNOV dalam hal pengaturan praktis. Dua opsi telah diidentifikasi:

26-30 Juli 2021, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina (UNOV)

Ini adalah opsi awal, yang telah diidentifikasi pada pertengahan 2020. Tanggalnya secara tentatif telah dituliskan dalam agenda Sekretaris Jenderal PBB.

Namun, dengan adanya pandemi COVID, hingga hari ini masih ada banyak ketidakpastian terkait kelayakan untuk mengadakan pertemuan fisik tingkat tinggi di mana pun di dunia pada bulan Juli. Banyak negara mengantisipasi bahwa vaksinasi luas tidak akan tercapai sebelum September. Peraturan yang saat ini diberlakukan di UNOV mengharuskan jarak sosial 2 meter antar delegasi dan, dengan demikian, jumlah peserta perlu dikurangi secara drastis. Oleh karena itu, telah disarankan bahwa IPU mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengadakan Konferensi di akhir tahun.

6-10 September 2021, Austria Center Vienna (ACV)

UNOV telah mengkomunikasikan bahwa, karena agendanya yang sibuk dan banyaknya sesi yang ditunda, akhir Juli akan menjadi satu-satunya waktu di tahun 2021 yang memungkinkan bagi mereka untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk Konferensi Ketua Parlemen. Satu-satunya pilihan lain adalah mengadakan Konferensi pada awal September di ACV, fasilitas yang dioperasikan secara swasta dan berlokasi dekat dengan UNOV (dihubungkan oleh terowongan) dan yang secara rutin telah menjadi tuan rumah pertemuan PBB. Otoritas Austria telah mengkonfirmasi bahwa jaminan visa yang sama akan diberikan untuk pertemuan delegasi di ACV seperti halnya jika pertemuan diadakan di UNOV.

Dalam kedua kasus tersebut, biaya tambahan sekitar 300.000 Euro (324.000 CHF) perlu ditanggung oleh ko-penyelenggara. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk merelokasi pertemuan rutin PBB dari UNOV (dalam hal pertemuan bulan Juli di tempat tersebut) atau untuk menyewa fasilitas ACV (pada bulan September). Informasi lebih lanjut tersedia di **Lampiran 1**. Biaya tambahan ini akan melebihi dan di atas 250.000 CHF yang telah dianggarkan oleh IPU untuk Konferensi (dengan sekitar 100.000 CHF untuk layanan konferensi dan 100.000 CHF lainnya untuk layanan juru bahasa dan penerjemahan).

Oleh karena itu, IPU akan mengandalkan Parlemen Tuan Rumah untuk membayar sebagian besar biaya tambahan.

Selain itu, meskipun diadakan pada bulan September, situasi epidemiologi di dunia mungkin tidak memungkinkan perjalanan ke Austria dari semua negara di dunia. Dalam keadaan seperti itu, Panitia Persiapan mungkin perlu mempertimbangkan opsi untuk **konferensi campuran/hibrid**.

Struktur Konferensi

Berdasarkan pengalaman dari Konferensi Ketua Parlemen sebelumnya, namun juga mengingat pekerjaan yang telah dilakukan selama segmen virtual pada tahun 2020, Konferensi tatap muka dan KTT Ketua Parlemen Perempuan dapat dilakukan selama 3 hari, dengan mengikuti alur berikut:

Hari 1 KTT Ketua Parlemen Perempuan (satu hari)

- Sore hari: rapat Panitia Persiapan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan

Hari 2 - Pagi: Pembukaan resmi Konferensi Ketua Parlemen (kata sambutan, pidato utama, debat interaktif)

- Sore Debat umum, diskusi panel

Hari 3 Debat umum, diskusi panel

- Kesimpulan dari debat umum, adopsi dokumen hasil (mungkin peta jalan tindakan parlemen untuk implementasi Deklarasi 5WCSP)

IPU juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan KTT Global Pertama tentang penanggulangan terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan, tepat setelah 5WCSP sebagai acara back-to-back, karena akan memungkinkan partisipasi para ketua parlemen yang tertarik.

Musyawarah 5WCSP akan diatur dalam Peraturan Konferensi yang telah diberlakukan pada tahun 2020 - lihat **Lampiran 2**. Bergantung pada langkah-langkah terkait COVID-19 yang berlaku, jumlah delegasi mungkin perlu dibatasi pada satu Ketua Parlemen dan tiga orang pendamping untuk setiap Majelis Parlemen.

Alokasi waktu untuk Konferensi akan memungkinkan dilaksanakannya 2-3 diskusi panel.

Tema yang mungkin, sebagaimana diidentifikasi dalam konsultasi dengan Parlemen

Austria dan mitra PBB kami adalah sebagai berikut:

- Diskusi panel tentang demokrasi dan tata kelola yang baik - apa yang kita pelajari tentang demokrasi selama pandemi (judul akan disepakati nanti);
- Diskusi panel tentang keamanan parlemen dan anggota parlemen, termasuk dalam konteks meningkatnya disinformasi, radikalisasi, dan ekstremisme yang dialami selama pandemi (akan diselenggarakan bekerja sama dengan UNODC).
- Diskusi panel tentang bagaimana mencapai pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang berkelanjutan (transformasi ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan);
- Panel tentang masa depan pasca pandemi dan peran IPU.

IPU juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan acara bersama terkait masalah kepentingan bersama dengan organisasi internasional lainnya yang berbasis di Wina (seperti IAEA dan CTBTO).

Persiapan KTT Ketua Parlemen Perempuan

Panitia Persiapan diundang untuk membentuk Kepanitiaan guna mempersiapkan KTT Ketua Parlemen Perempuan. Sebagaimana disepakati pada KTT tahun 2020, Panitia harus menyertakan para Ketua Parlemen Perempuan yang merupakan anggota Panitia Persiapan 5WCSP.

Panitia yang bertugas menyiapkan segmen tatap muka 13SWSP akan bertemu pada kesempatan rapat Panitia Persiapan. Disarankan agar Panitia bertemu selama satu jam sebelum setiap pertemuan Panitia Persiapan 5WCSP.

Panitia akan mengidentifikasi tujuan, agenda, dan hasil yang diharapkan dari segmen tatap muka 13SWSP. Panitia juga akan mengidentifikasi cara terbaik untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pekerjaan dan hasil 5WCSP.

Kerja dan rapat Panitia yang bertugas menyiapkan segmen tatap muka 13SWSP akan didukung oleh Sekretariat IPU.

LAMPIRAN I

Perbandingan biaya

Tidak akan ada **biaya sewa** untuk mengadakan acara di Vienna International Center (VIC, tempat Kantor PBB di Wina), meskipun biaya 15.000 Euro akan dikenakan untuk set-up Aula Pleno besar dan pembongkarannya setelah acara. Namun, beberapa pertemuan IAEA yang dijadwalkan berlangsung pada Juli dan Agustus harus dipindahkan ke ACV. Biaya terkait harus ditanggung oleh penyelenggara 5WCSP. Perkiraan biaya adalah 225.000 Euro, sedangkan rancangan perkiraan biaya sewa ACV untuk 5WCSP adalah 300.000 Euro.*

Ruang pertemuan VIC **dilengkapi** dengan audio-visual (AV), perangkat penjurubahasaan simultan (SI) dan fasilitas teknis lainnya. Di ACV, akan ada biaya tambahan untuk peralatan AV/SI a dengan draft estimasi sebesar 25.000 Euro telah diserahkan. Namun, ruang pertemuan VIC ditawarkan berbasis cost-recovery untuk staf (teknisi AV dan SI, petugas ruang, dll.) Dan biaya overhead 13% untuk pertemuan anggaran ekstra, diperkirakan sebesar 50-60.000 Euro.

Biaya keamanan di VIC dan ACV diperkirakan mencapai 25.000 Euro.

Keseluruhan biaya penyelenggaraan acara pada bulan Juli di gedung PBB adalah sekitar 325.000 Euro, dan di AVC sekitar 350.000 Euro*.

Biaya lain seperti penjurubahasaan, penerjemahan, hospitality, perjalanan, akomodasi, dll., akan dikenakan, terlepas dari tanggal dan tempatnya. Namun, harus disebutkan bahwa jika acara tersebut akan menjadi format hybrid, akan ada biaya tambahan (platform atau antarmuka konferensi dengan penjurubahasaan simultan, atau teknologi lain yang akan memungkinkan Pembicara jarak jauh mengikuti acara dan mengambil kesempatan, dukungan teknis , dll.) yang tidak diperkirakan dalam anggaran awal.

	Vienna International Center (VIC), gedung PBB 26 hingga 30 Juli 2021	Austria Center Vienna (ACV), fasilitas komersial 6 hingga 10 September 2021
Biaya sewa	Gratis	300.000 Euro*
Relokasi pertemuan IAEA dari VIC ke ACV	225.000 Euro	Tidak berlaku
Staf, set-up ruangan, dan biaya cost-recovery	75.000 Euro	Termasuk dalam biaya sewa
Dukungan audio-visual	Termasuk	25.000 Euro*
Keamanan	25.000 Euro	25.000 Euro
Total	325.000 Euro (351.000 CHF)	350.000 Euro (378.000 CHF)

* Termasuk PPN sebesar 20 persen, konfirmasi menunggu apakah IPU, sebagai organisasi internasional, dapat memperoleh keuntungan dari pembebasan PPN, seperti yang terjadi di Swiss dan AS.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



REPUBLIC OF AUSTRIA
Parliament

Konferensi Ketua Parlemen Dunia Kelima

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, Wina (Austria), 19–21 Agustus 2020

DRAFT ATURAN KONFERENSI

ATURAN 1

Konferensi Ketua Parlemen Dunia Kelima diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), bekerjasama erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Parlemen Austria (selanjutnya disebut sebagai Parlemen Tuan Rumah).

Tempat dan durasi

ATURAN 2

1. Konferensi tersebut diadakan di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2020.
2. Konferensi akan memulai musyawarahnya pada hari Rabu, 19 Agustus pukul 10 pagi dan akan berakhir pada pukul 6 sore pada hari Jumat, 21 Agustus 2020.
3. Konferensi akan mengadakan enam pertemuan dari jam 10 pagi sampai 1 siang di pagi hari dan dari jam 3 sore sampai jam 6 sore di sore hari.

4. Jika perlu, Presiden Konferensi dapat memutuskan, atas saran dari Komite Pengarah, untuk memperpanjang perdebatan tentang beberapa posisi.

Peserta dan pengamat

ATURAN 3

1. Undangan ke Konferensi akan diberikan oleh Presiden IPU dan Ketua Parlemen Tuan Rumah kepada Ketua Parlemen dari semua Parlemen Anggota IPU dan kepada Ketua Parlemen dari semua parlemen lain dari Negara Anggota PBB yang tidak diwakili di IPU.
2. Dalam kasus parlemen bikameral, undangan akan ditujukan kepada Ketua Parlemen dari kedua chamber.
3. Presiden dari majelis dan organisasi parlemen regional dan internasional utama, serta perwakilan dari program dan badan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menghadiri sidang Konferensi sebagai pengamat.

Jumlah delegasi

ATURAN 4

Jumlah delegasi tiap parlemen pada prinsipnya tidak boleh melebihi enam orang (10 orang dalam kasus parlemen bikameral), termasuk Ketua Parlemen. Anggota Associate dapat mendaftarkan maksimal empat delegasi; Delegasi pengamat yang diundang, pada prinsipnya, terdiri dari tidak lebih dari dua orang.

Agenda dan Aturan

ATURAN 5

Pada awal persidangannya, Konferensi akan mengadopsi Agenda dan Aturannya. Agenda sementara akan didistribusikan sebelum Konferensi, bersama dengan rancangan aturan yang diusulkan oleh Panitia Persiapan.

Presiden dan Komite Pengarah

ATURAN 6

1. Presiden IPU akan menjadi Presiden Konferensi dan akan membuka, menanggihkan, dan menutup sidang, mengarahkan proses Konferensi, memastikan bahwa Peraturan dipatuhi, memanggil ketua parlemen, dan menyatakan Konferensi ditutup. Keputusan Presiden dalam hal ini bersifat final dan akan diterima tanpa perdebatan.

2. Presiden akan memutuskan semua hal yang tidak tercakup dalam Aturan ini, setelah menerima nasihat dari Komite Pengarah jika perlu.
3. Presiden akan dibantu oleh Ketua Parlemen yang diusulkan di tingkat regional di antara Ketua Parlemen yang menjadi bagian dari Panitia Persiapan.

ATURAN 7

1. Komite Pengarah terdiri dari Presiden IPU, Ketua Parlemen Tuan Rumah, Wakil Presiden dari Komite Eksekutif IPU dan Wakil Presiden dari Panitia Persiapan yang mewakili setiap kelompok geopolitik.
2. Komite Pengarah, yang akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal IPU, harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan pengaturan yang efektif dan kelancaran fungsi acara Konferensi, sesuai dengan Aturan ini.

Hak berbicara – Urutan/Ketertiban

ATURAN 8

1. Para ketua parlemen, Presiden, dan orang-orang berikut ini akan diundang untuk tampil dan berbicara di Konferensi:
 - (i) Semua Ketua parlemen yang telah menerima undangan sesuai dengan Aturan 3 Aturan ini, termasuk Ketua dari kedua chamber dalam kasus parlemen bikameral;

(ii) Ketua majelis parlemen resmi yang merupakan Anggota Asosiasi dan Pengamat Tetap IPU.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diundang untuk menyampaikan pidato pada upacara pengukuhan Konferensi, dan Presiden Majelis Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diundang untuk berbicara pada Konferensi tersebut. Presiden Konferensi dapat mengundang orang lain untuk berpidato di Konferensi, setelah berkonsultasi dengan Komite Pengarah.

ATURAN 9

1. Setiap Ketua parlemen pada prinsipnya berhak atas waktu bicara selama lima menit. Dalam kasus di mana kedua ketua dari parlemen bikameral ingin berpidato di depan Konferensi, masing-masing pada prinsipnya berhak untuk berbicara selama empat menit.
2. Presiden dari majelis parlemen resmi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 8.1 (ii) di atas masing-masing berhak atas waktu bicara selama tiga menit.
3. Presiden Konferensi dapat mengizinkan, atas saran dari Komite Pengarah, pencantuman dalam catatan dan publikasi pidato berikutnya yang tidak dapat disampaikan oleh delegasi yang hadir di Konferensi.

4. Untuk Debat Umum, terjemahan akan disediakan dalam enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diskusi panel dan acara lain yang merupakan bagian dari program resmi Konferensi akan dilakukan dalam empat bahasa kerja IPU (Inggris, Prancis, Spanyol dan Arab).

ATURAN 10

Urutan ketua parlemen harus ditetapkan oleh Sekretariat IPU, dengan mempertimbangkan, sejauh mungkin, preferensi yang diungkapkan oleh setiap delegasi yang terdaftar. Presiden Konferensi, dibantu oleh Komite Pengarah, akan menangani semua hal yang berkaitan dengan urutan ketua parlemen.

ATURAN 11

Ketua Parlemen yang sedang berbicara hanya dapat diinterupsi oleh delegasi lain pada saat tertentu. Presiden akan segera memerintah tanpa memperdebatkan semua poin urutan.

ATURAN 12

Presiden akan meminta ketua parlemen yang tidak dapat membatasi topik yang dibicarakan atau yang berprasangka buruk pada perdebatan dengan menggunakan bahasa kasar untuk kembali menjaga ketertiban. Presiden dapat, jika perlu, mencabut izin untuk berbicara, dan mungkin meminta kata-kata yang tidak pantas ditarik oleh ketua parlemen yang sedang berbicara dan/atau dihapus dari catatan.

ATURAN 13

Presiden harus segera menangani setiap insiden yang muncul selama Konferensi dan, jika perlu, mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban.

Adopsi Deklarasi

ATURAN 14

1. Konferensi akan diakhiri dengan mengadopsi Deklarasi secara khidmat.
2. Rancangan Deklarasi yang disiapkan oleh Panitia Persiapan harus didistribusikan kepada semua peserta sebelum Konferensi.
3. Panitia Persiapan akan bertemu pada malam Konferensi, dan dapat mengubah teks jika perlu.
4. Rancangan Deklarasi harus dipresentasikan ke Konferensi oleh Pelapor.

Dokumen resmi

ATURAN 15

1. Agenda sementara, draft Deklarasi yang dibuat oleh Panitia Persiapan, draft Aturan, laporan yang ditugaskan oleh Panitia Persiapan Konferensi, daftar peserta, dan jurnal harian dari prosiding Konferensi yang disiapkan oleh Sekretariat akan menjadi satu-satunya dokumen resmi Konferensi.

2. Dokumen akan disusun dan didistribusikan dalam bahasa Inggris dan Prancis, dua bahasa kerja resmi IPU. Setelah diadopsi, Deklarasi Akhir akan diterjemahkan dan diedarkan dalam enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Dokumen informasi yang mungkin ingin didistribusikan oleh delegasi harus ditempatkan di atas meja khusus untuk tujuan ini di pintu masuk ke Aula Pleno.

Sekretariat

ATURAN 16

1. Sekretaris Jenderal IPU atau wakilnya akan membantu Presiden dalam mengarahkan jalannya Konferensi.
2. Sekretaris Jenderal IPU atau perwakilannya dapat diundang oleh Presiden untuk mengklarifikasi masalah apa pun selama debat.

**BAHAN MASUKAN PERTEMUAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PREPARATORY COMMITTEE OF THE FIFTH WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS
OF PARLIAMENT**

GAMBARAN UMUM

1. *Preparatory Committee* pada *Fifth World Conference Of Speakers Of Parliament* (5WCSP) bertanggungjawab untuk membahas dan menentukan agenda sidang yang terdiri atas tema, *outcome document*, tanggal, dan tempat penyelenggaraan.
2. Pada *Preparatory Committee*, secara prinsip kiranya dapat disampaikan agar pembahasan 5WCSP diarahkan pada isu yang relevan dengan *output* konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Parlemen seluruh negara.
3. Dalam aspek teknis, perlu juga diperhatikan kemungkinan pelaksanaan 5WCSP secara fisik di Wina pada pertengahan 2021. Sekiranya masih terdapat hambatan untuk melaksanakan pertemuan skala besar, perlu dicermati opsi-opsi seperti penundaan pelaksanaan 5WSCP dan pelaksanaan dengan mekanisme *hybrid* sebagaimana pertemuan internasional lainnya.

USULAN TEMA 5WCSP

4. Adapun usulan tema yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh DPR RI guna diusulkan pada *Preparatory Committee*, antara lain:
 - a. **Sustainable Recovery Post Covid-19 Pandemic**
 - i. Tema ini akan membahas secara umum bagaimana upaya pemulihan pasca pandemi yang bersifat berkelanjutan dengan berdasarkan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan peran parlemen dalam upaya tersebut.
 - ii. Secara global, pandemi COVID-19 menyebabkan hambatan terhadap pencapaian SDGs. Di sisi lain, pandemi memperlihatkan lemahnya sistem global yang ada; bagaimana kemiskinan, sistem kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kerja sama internasional telah terbukti memperburuk krisis.
 - iii. Parlemen menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan langsung dan jangka panjang. Dalam menyusun sebuah undang-undang, komitmen anggota parlemen penting untuk menghasilkan sebuah peraturan yang kapabel serta mengawasi terimplementasinya sebuah kebijakan. Sedangkan legislasi sebagai peran pendukung untuk membuat kebijakan yang mengakomodasi pemulihan ekonomi dan dampak lingkungan akibat pandemi Covid-19.
 - iv. Setidaknya terdapat beberapa pendekatan berkelanjutan menurut IPU yang dapat didorong dalam proses pemulihan pasca pandemi, yaitu:
 - a) Infrastruktur hijau
 - b) *Clean Energy*
 - c) Pengelolaan limbah
 - d) *Green jobs*
 - e) Keanekaragaman hayati dan solusi berbasis alam
 - f) Aturan hukum dan perlindungan lingkungan
 - v. Dalam satu setengah tahun ke depan, investasi dalam pemulihan Covid-19 kemungkinan akan melebihi US\$12 triliun secara global. Kebijakan dan

undang-undang yang akan diberlakukan selama periode ini akan menentukan ketahanan, keberlanjutan, dan daya saing ekonomi nasional selama beberapa dekade mendatang. Parlemen, yang berada di garis depan dalam merancang undang-undang dan mengawasi kebijakan, dapat membuat memiliki peran signifikan dalam transformasi dan perkembangan ekonomi nasional.

- vi. Tema ini menjadi penting untuk Indonesia mengingat Indonesia (cq DPR RI) merupakan inisiator *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) yang merupakan forum parlemen pertama yang membahas SDGs yang diselenggarakan pertama kali pada 2017. Terlebih di tahun 2021, DPR RI dan IPU akan menyelenggarakan *First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs*.
- vii. Ketua DPR kiranya dapat menyampaikan upaya dalam mendorong Pemerintah untuk pemulihan pasca pandemi yang bersifat berkelanjutan seperti melalui proses legislasi, mekanisme penganggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif, serta giat diplomasi parlemen di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

b. Equal Access to Vaccines and Therapeutic

- i. Tema ini menggarisbawahi pentingnya distribusi vaksin yang merata dengan memastikan keamanan dan efikasi vaksin dimaksud. Isu vaksin akan tetap menjadi prioritas pembahasan global hingga pandemi Covid-19 selesai mengingat masih adanya kemunculan varian baru yang meningkatkan kompleksitas efektivitas vaksin yang telah ada. Mempertimbangkan pentingnya isu ini, tema dapat membahas bagaimana dukungan parlemen dalam meningkatkan akses negara terhadap vaksin.
- ii. Isu vaksin menjadi sangat strategis bagi Indonesia mengingat hal-hal berikut:
 - a) Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga vaksinasi yang didukung dengan perilaku 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, dan Mencuci Tangan) yang didukung dengan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) akan menjadi penentu dalam penyelesaian pandemi di Indonesia.
 - b) Indonesia terlibat aktif dalam deliberasi *COVAX Facility* khususnya karena Menlu RI merupakan *Co-Chair COVAX Advance Market Commitment Engagement Group* (AMC EG) bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada.
 - c) Sebagai Co-Chair COVAX AMC EG, Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan agar seluruh negara di dunia dapat memperoleh vaksin COVID-19 yang berkualitas dengan segera, secara merata dan berkeadilan.
 - d) Indonesia dalam jangka panjang akan produksi Vaksin Merah Putih dengan melibatkan 6 (enam) institusi yakni Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Vaksin Merah Putih dapat menjadi upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam penyediaan vaksin nasional dan global.
- iii. Sebagai catatan, Indonesia rencananya akan mendapatkan alokasi indikatif Vaksin AstraZeneca/AZ sejumlah 13,708,800 - 23,169,600 dosis. Estimasi

jadwal pengiriman adalah pertengahan/akhir Februari 2021, setelah mendapatkan *Emergency Use Listing* (EUL) dari WHO.

- iv. Salah satu isu terbaru yang mengemuka adalah isu sertifikasi halal terhadap vaksin dan *awareness* terkait pentingnya vaksin di kalangan masyarakat. Dhi, MUI akan segera memulai proses sertifikasi halal untuk vaksin multilateral, paralel dengan proses penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) oleh BPOM. *Awareness* terhadap masyarakat juga terus ditingkatkan melalui komunikasi publik dan promosi kesehatan, termasuk melalui parlemen.
- v. Ketua DPR kiranya dapat menyampaikan dorongan terhadap kerja sama vaksin baik di tingkat multilateral maupun bilateral untuk memastikan distribusi vaksin yang aman dan andal. Ketua DPR dapat menyampaikan upaya nasional dalam memastikan hal tersebut termasuk keterlibatan aktif Indonesia pada COVAX AMC EG dan peran parlemen dalam upaya memastikan peraturan terkait vaksinasi dan membantu mendorong vaksinasi di konstituen masing-masing.

c. Role of ICT during the Pandemic

- i. Di tengah pembatasan sosial pada masa pandemi, TIK menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, khususnya dengan penerapan *work from home*, *remote learning*, dan aktivitas lainnya berbasis TIK.
- ii. Meningkatnya peran TIK menimbulkan dampak laten yaitu kerentanan dengan maraknya misinformasi dan disinformasi. Hal ini akan menjadi kontraproduktif dalam upaya Pemerintah untuk menuntaskan pandemi dan mampu berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan demikian, TIK perlu dimanfaatkan sebagai alat utama untuk mengoordinasikan dan menginformasikan pemangku kepentingan dan masyarakat.
- iii. Layanan TIK dalam hal ini mencakup komunikasi seluler, satelit, terestrial, WiFi dan teknologi lainnya yang memungkinkan layanan *broadband* dan penyiaran.
- iv. Menanggapi hal tersebut, *International Telecommunication Union* (ITU) telah menyusun panduan untuk mengembangkan rencana kontingensi TIK untuk respons pandemi, yaitu:
 - a) Legislasi dan regulasi untuk meningkatkan kapasitas TIK untuk tanggap darurat. Di tengah krisis perlu dikeluarkan peraturan untuk penggunaan TIK untuk tanggap darurat. Peraturan dan kepastian hukum dapat memberikan kerangka kerja kelembagaan untuk tindakan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghadapi keadaan darurat seperti pandemi Covid-19. Peraturan yang efektif yang diterapkan dalam menanggapi keadaan darurat akan memfasilitasi koordinasi multisektoral.
 - b) Elemen manajemen TIK untuk kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap keadaan darurat. Manajemen TIK perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan kelangsungan operasional TIK, serta memahami saluran komunikasi dan jenis informasi yang harus dibagikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kredibel, aman, gender responsif, dan memperhatikan aspek privasi.

- c) Implementasi ketentuan oleh regulator dan pemerintah untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi. Langkah-langkah tersebut termasuk dalam upaya meningkatkan *bandwidth*, memperkuat ketahanan dan keamanan jaringan, dan mengelola *traffic* siber. Langkah tersebut juga harus berupaya menghubungkan layanan vital dan memastikan kesinambungan layanan publik untuk menjaga kesejahteraan penduduk; memberdayakan keuangan, teknologi, dan model bisnis digital untuk mendukung bisnis dan komunitas yang paling terkena dampak; mempromosikan keamanan siber; dan memanfaatkan kekuatan *big data*.
- v. Pemri memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan TIK di tengah pandemi, antara lain melalui:
 - a) Mendorong 3,000 fasilitas rumah sakit di Indonesia untuk terhubung dengan jaringan satelit.
 - b) Mengejar pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) agar akses internet dapat cepat merata.
 - c) Secara aktif melakukan pengendalian dan klarifikasi terhadap informasi menyesatkan (disinformasi) dan hoaks mengenai Covid-19 yang beredar di melalui *website*, platform media sosial dan pesan instan.
 - d) Meluncurkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan proses pelacakan dan pemantauan Covid-19.
- vi. Isu ini menjadi strategis bagi Indonesia mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan sehingga TIK memegang peranan penting bagi konektivitas NKRI.
- vii. Dalam kaitan itu, parlemen memegang peranan penting untuk mendorong penggunaan TIK di tengah pandemi dan menekan risiko yang ditimbulkan akibat misinformasi dan disinformasi. Secara luas, misinformasi dan disinformasi juga berdampak pada demokrasi.
- viii. Ketua DPR kiranya dapat menyampaikan peran serta parlemen dalam penggunaan TIK untuk mendukung upaya pemulihan di masa pandemi dan pentingnya mendorong upaya memerangi misinformasi / *hoax* di kalangan masyarakat.

d. Issues Related to Women Leadership and Women in Parliaments

- i. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan redefinisi dalam konteks partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan sebagai kepala negara dan pemerintahan, petugas kesehatan, pengasuh di rumah, penggerak masyarakat, dan tenaga pendidik berperan maksimal dalam pandemi. Stigma perempuan menjadi *second line* dari laki-laki sedikit tereduksi dengan adanya realitas kepemimpinan tangguh perempuan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan efektif untuk mengatasi pandemi.
- ii. Sebanyak setidaknya 21 negara di seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang perempuan sebagai kepala pemerintahan/kepala negara, seperti Denmark, Ethiopia, Finlandia, Jerman, Selandia Baru, Islandia dan Slovakia. Sejauh ini kepemimpinan mereka dipuji karena efektivitasnya yang lebih besar dalam mengelola krisis kesehatan Covid-19. Hal ini mendapat pengakuan global atas responsibilitas mereka terhadap regulasi penanganan Covid 19 melalui pembatasan, jarak sosial, *tracking* dan pengujian, akuntabilitas informasi kesehatan terhadap masyarakat, dan bantuan sosial.

- iii. Di tengah pandemi, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dampak pandemi COVID-19 pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, antara lain melalui:
 - a) Memperkuat kerangka hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dengan memastikan bahwa peraturan daerah sejalan dengan peraturan nasional, dan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 - b) Penyediaan kebutuhan khusus perempuan, anak dan lansia terdampak COVID-19, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus
 - c) Penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan pengobatan COVID-19 bagi anak dan perempuan
 - d) Pemberian perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pada masa pandemi COVID-19.
 - e) Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha dengan dana Rp 700 triliun dengan menargetkan perempuan sebagai pemegang Kartu Penerima Manfaat (KPM).
 - f) Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan stimulus kepada usaha mikro, baik laki-laki maupun perempuan. Stimulus tersebut berupa bantuan modal kerja (hibah) untuk Banpres Usaha Mikro Produktif (BPUM) senilai Rp. 2,4 juta per UKM. Per 6 Oktober 2020, 9.109.968 pelaku usaha mikro (75,92%) dari target 12 juta usaha mikro telah mendapatkan manfaat dari program tersebut. Total realisasi anggaran untuk stimulus ini mencapai Rp. 21.863.923.200.000.
 - iv. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melaksanakan program peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi calon legislatif perempuan dan anggota legislatif perempuan terpilih, sepanjang tahun 2019.
 - v. Pada tahun 2020, KPPPA juga mengaktifkan kembali Kelompok Kerja Politik Perempuan (Pokjapol) dan bersama dengan beberapa instansi pemerintah pusat, lembaga penelitian dan CSO telah menyusun *Grand Design* untuk Peningkatan Perempuan Keterwakilan di DPR periode sampai dengan tahun 2030. *Grand Design* ini memuat strategi dan langkah-langkah peningkatan keterwakilan perempuan yang dirinci menjadi rencana aksi dan dikategorikan menjadi 3 periode, yaitu sebelum pemilu, saat pemilu, dan setelah pemilu.
 - vi. Isu ini menjadi strategis untuk diangkat bagi Indonesia untuk berbagi *best practice* dan meningkatkan keterlibatan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan termasuk di tengah pandemi. Terlebih, Bu Puan Maharani merupakan Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia sehingga sesuai untuk mengangkat isu dimaksud.
 - vii. Ketua DPR kiranya dapat menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan peran perempuan baik secara umum maupun di tengah pandemi. Kiranya dapat disampaikan pula peran parlemen, khususnya perempuan, untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun global, dan dalam upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19.
5. Tema di atas merupakan gambaran secara umum isu-isu yang relevan untuk dibahas oleh Ketua Parlemen secara global. Diharapkan dapat muncul Deklarasi yang berisi rekomendasi dan *plan of action* mengenai komitmen dan dukungan parlemen terkait isu sebagaimana dijelaskan di atas.

SARAN BUTIR WICARA

6. Indonesia believes that the theme raised at 5WCSP needs to reflect the global challenge that we face today and be able to produce Declaration which consists of recommendations to convey the commitment and support of the parliament regarding the conference theme.
7. Thus, the issue raised needs to be related to the Covid-19 pandemic and how parliament is a part of the solution.
8. In the technical aspect, it is necessary to pay attention to the possibility of conducting physical meeting of the 5WCSP in Vienna in mid-2021. I believe if there is still restriction to hold large-scale meeting, it is important to consider the alternative ways to hold the 5WSCP.
9. Indonesia would like to propose several issues as the theme of 5WCSP... **First, Sustainable Recovery Post Covid-19 Pandemic.**
 - a. This theme will discuss in general the post-pandemic recovery efforts based on the Sustainable Development Goals (SDGs) and the role of the parliament.
 - b. In the next year and a half, investment in the Covid-19 recovery is likely to exceed US \$ 12 trillion globally. The policies that will be enacted during this period will determine the resilience and sustainability of the national economy over the coming decades.
 - c. Thus, the Parliament, which is at the forefront of drafting laws and overseeing policies, is the key to immediate and long-term recovery efforts.
 - d. Indonesia is the initiator of the World Parliamentary Forum on Sustainable Development which is the first parliamentary forum to discuss SDGs. This year, Indonesia and IPU will also held the First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs.
 - e. The House of Representative of Indonesia is committed to support post-pandemic sustainable recovery through the legislative process, budgeting mechanisms and oversight of the executive, as well as through active parliamentary diplomacy.
 - f. This theme is expected to produce deliberation and recommendations on the role of parliament in post-pandemic sustainable recovery.
10. **Second, Equal Access to Vaccines and Therapeutic...**
 - a. This theme underscores the importance of equitable distribution of vaccine by ensuring its safety and efficacy.
 - b. The issue of vaccine will remain a priority for global discussion until the Covid-19 pandemic is over, given the emergence of new variants that increase the complexity of the effectiveness of existing vaccines.
 - c. As a country with a very large population, vaccination supported by health protocol will be the determinant in solving the pandemic in Indonesia.
 - d. Indonesia is actively involved in the deliberation of the COVAX Facility especially as the Co-Chair of the COVAX Advance Market Commitment Engagement Group.

As a Co-Chair, Indonesia has a strategic role to ensure that all countries in the world can obtain a quality COVID-19 vaccine immediately, equitably and fairly.

- e. Indonesia will also, in the long run, produce our national vaccine as our effort to contribute to the provision of national and global vaccines.
- f. Considering the importance of this issue, WCSP can discuss how parliaments support the states' access to equitable and safe vaccine.

11. Third, Role of ICT during the Pandemic...

- a. ICT has become an inseparable part of community activities, especially with the application of work from home, remote learning, and other ICT-based activities.
- b. The increasing role of ICT has a latent impact, namely misinformation which will be counterproductive to the Government's efforts to resolve the pandemic and have an impact on public health. As such, ICT needs to be utilized as the primary tool for coordinating and informing stakeholders and communities.
- c. Indonesia has specifically paid attention to the use of ICT including through connecting more than 3,000 hospital facilities by satellite network, boosting the development of telecommunications infrastructure, actively clarifying misleading information, and launching applications to improve the Covid-19 tracking and monitoring process.
- d. In this regard, this theme could discuss parliament role in encouraging the use of ICT in the midst of a pandemic and recommendation to reduce the risks posed by misinformation.

12. Fourth, Issues Related to Women Leadership and Women in Parliaments...

- a. The pandemic has led to redefinitions in the context of women's leadership as women play a great role in the fight against pandemic.
- b. There are at least 21 countries around the world led by a woman as the head of government / head of state... and they have all been globally recognized for their responsibility in handling the pandemic.
- c. Indonesia has made various efforts to prevent the impact of the Covid-19 pandemic on women, including through the strengthening of the legal framework, provision of special needs of women affected by Covid-19, providing social protection and economic empowerment for women, and so on.
- d. Indonesia has also implemented a capacity building program for women legislative candidates and elected members throughout 2019 and reactivated the Women's Political Working Group in 2020.
- e. With this theme, Parliaments can share best practices and increase the protection and empowerment of women, especially in the midst of a pandemic.

13. Indonesia is looking forward to more discussion on the agenda and technical matters for 5WCSP.



Ketua DPR Sampaikan Pentingnya Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Pandemi

23-02-2021 / PIMPINAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021). Foto : Prima/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Menurutnya, meski vaksin sudah mulai tersedia sejak awal tahun 2021, namun pendistribusian vaksin yang masih belum merata perlu terus didorong.

"*Speakers Conference* perlu terus mendorong terjaminnya akses adil bagi vaksin yang aman, efektif dan berkualitas bagi semua orang," terang Puan dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth *World Conference of Speakers of Parliament*, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan bahwa konferensi antar Parlemen dari 19 negara anggota *Intern Parliamentary Union* (IPU) kali ini merupakan forum yang tepat untuk mempererat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita dapat berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan kepemimpinan Parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan paska pandemi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 itu.

Selain itu, menurut Puan, dalam konferensi ini nantinya perlu untuk memastikan agar pemulihan paska pandemi dapat dilakukan sejalan dengan pencapaian SDGs, *Paris Climate Agreement*, geopolitik, persamaan gender dan isu-isu lainnya.

Untuk itu, ia mengusulkan bahwa pembahasan dalam konferensi yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang, fokus pada isu pemulihan pascapandemi. "Pembahasan perlu difokuskan pada isu pemulihan paska pandemi sehingga kita bisa bersama-sama melakukan hal-hal yang kemudian bisa dilakukan bersama oleh semua negara," kata Puan.

Turut hadir mendampingi Puan dalam agenda ini, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Sihar Sitorus, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti. **(bia/sf)**





Forum Parlemen Perempuan Dorong Kolaborasi dan Sinergi antar Pimpinan Parlemen Perempuan

23-02-2021 / PIMPINAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021). Foto : Prima/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung penuh diselenggarakannya forum *13th Summit of Women Speakers*. Menurutnya, agenda ini akan menjadi forum yang tepat untuk berbagi pengalaman antar Parlemen Perempuan di seluruh dunia sehingga diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan sinergi antar pimpinan Parlemen

Perempuan.

"*Summit* ini akan menjadi forum yang tepat untuk berbagi pengalaman bagaimana Parlemen Perempuan dapat berperan besar dalam penanganan pandemi," terang Puan dalam pertemuan virtual *The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament*, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Lebih lanjut, Pimpinan Parlemen Perempuan pertama di Indonesia itu juga mengusulkan pembahasan mengenai bagaimana perempuan dan anak perempuan yang paling berdampak saat pandemi ini mempunyai solusi dan harapan dimasa yang akan datang. "Isu terkait *gender-responsive recovery dan women economic empowerment* merupakan isu utama yang perlu mewarnai pembahasan pada *Summit* tersebut," ungkapnya.

Selain itu, dalam pertemuan virtual antar parlemen di seluruh dunia ini, Puan juga menyampaikan persetujuannya terhadap pelaksanaan *The Fifth World Conference of Speakers of Parliament* yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang secara tatap muka, namun ia menekankan untuk tetap memperhatikan situasi pandemi Covid-19.

"Tetap harus disiapkan opsi *hybrid meeting* dan tidak menutup kemungkinan menjadi *virtual meeting* jika situasi memang tidak memungkinkan datang langsung ke Austria atau Wina," imbuh legislator dapil Jawa Tengah V itu.
(bia/sf)





Puan Maharani Bicara Pemulihan Pasca-Pandemi di Forum Parlemen Dunia

23-02-2021 / PIMPINAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021). Foto : Eot/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menurut Puan, kerja sama internasional sangat baik dilakukan di tengah berbagai tantangan global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kemiskinan dan kesenjangan sosial, ketimpangan gender, konflik dan Light perang,

serta perkembangan teknologi informasi.

“Pandemi global ini menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama ini. Saat ini kerja sama internasional telah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Puan dalam pertemuan virtual *The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)* di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan pandangannya bahwa agenda 5WCSP kali ini diadakan pada saat yang tepat, yaitu di saat dunia menghadapi tantangan besar untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menurutnya, acara ini akan menjadi forum yang bermanfaat untuk mempererat kemitraan global, dan memperkuat solidaritas bersama.

Termasuk untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kepemimpinan parlemen untuk berkontribusi menangani pandemi, dan melakukan pemulihan pasca pandemi yang sejalan dengan pencapaian SDGs, perubahan iklim, dan pemberdayaan perempuan.

“Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai upaya meneguhkan kembali komitmen kita akan prinsip multilateralisme yang menjunjung tinggi solidaritas dan kolaborasi,” ujar pimpinan parlemen perempuan pertama di Indonesia itu.

Pertemuan *the World Conference of speakers of Parliament* diadakan setiap lima tahun dan merupakan pertemuan puncak *Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama Parlemen dunia. Pertemuan mendatang direncanakan diadakan di Wina, tanggal 6-9 September 2021. Selain pertemuan utama 5WCSP, pada kesempatan itu akan diadakan pula *Summit of Women Speakers of Parliament (SWSP)*.

Pertemuan dipimpin oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan dihadiri oleh 19 anggota *Preparatory Committee*, yang merupakan *Speaker* dan Presiden Parlemen berbagai negara. *Preparatory Committee* ini bertugas menyiapkan pertemuan utama 5WCSP terkait substansi, tema, format, dan hasil pertemuan.

Puan merupakan satu-satunya pimpinan Parlemen dari Asia Tenggara yang menjadi bagian dari *Preparatory Committee*. Pada pertemuan *Preparatory Committee* ini, Puan juga diminta untuk menyiapkan SWSP, bersama beberapa Pimpinan Parlemen perempuan lainnya.

Terkait konferensi, Puan mengusulkan tema 'Kepemimpinan Parlemen dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19'. "Tema ini akan memberikan pandangan ke depan bagaimana parlemen dapat berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi penyelesaian pandemi Covid-19," pungkasnya. (bia/es)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.